

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

A. VISI DAN MISI

Visi adalah gambaran mengenai kondisi ideal yang diinginkan stakeholders pada masa yang akan datang. Dengan Visi yang jelas, akan menjadi petunjuk bagi setiap jajaran (stakeholders) di Kabupaten Murung Raya dalam menyosong masa depan. Visi akan menentukan arah “akan dibawa kemana” Kabupaten Murung Raya dalam akhir periode perencanaan pembangunan sedangkan Misi adalah suatu yang harus diemban/dilaksanakan oleh para pihak yang berkepentingan (stakeholders) di Kabupaten Murung Raya, termasuk instansi Pemerintah agar visi dapat diwujudkan-nyatakan dengan baik.

Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Murung Raya, 2007 – 2011, disusun dengan memperhatikan:

- a. Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, 2004 – 2009, seperti yang dirumuskan dalam Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2005, yaitu:
 1. Terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang aman, bersatu, rukun dan damai.
 2. Terwujudnya masyarakat, bangsa, dan negara yang menjunjung tinggi hukum, kesetaraan, dan hak azasi manusia; serta
 3. Terwujudnya perekonomian yang mampu menyediakan kesempatan kerja dan penghidupan yang layak serta memberikan pondasi yang kokoh bagi pembangunan yang berkelanjutan.
- b. Visi Rencana Strategis Daerah Kabupaten Murung Raya, Tahun 2004 – 2008 seperti terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 34 Tahun 2004, yaitu :

Terwujudnya Kabupaten Otonom yang Mandiri, Maju dan Sejahtera dengan dukungan kualitas SDM dan potensi SDA yang tersedia dalam lingkungan yang harmonis, berdasarkan budaya dan adat istiadat yang dinamis.
- c. Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Murung Raya, Tahun 2007 – 2026 yang dirumuskan sebagai berikut:

Kabupaten Murung Raya yang Maju, Mandiri, dan Sejahtera

Dengan memperhatikan pula kondisi dan potensi daerah serta prakiraan akan tantangan dan peluang di masa depan, maka Visi Pembangunan Daerah Jangka Menengah Kabupaten Murung Raya, Periode Tahun 2008-2013, adalah:

Terwujudnya kemerdekaan rakyat yang sesungguhnya dari kemiskinan, kebodohan, dan keterisolasian menuju Murung Raya yang maju, unggul, sejahtera, dan bermartabat.

Visi Pembangunan Daerah Jangka Menengah tersebut tetap berada dalam koridor cita-cita menuju masyarakat yang maju, mandiri dan adil, seperti dimaksud dalam Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan juga visi Jangka Panjang Pembangunan Nasional.

Dalam upaya mewujudkan-nyatakan Visi Pembangunan Daerah tersebut di atas, ditempuh melalui tujuh Misi Pembangunan Daerah. Dari ke tujuh misi tersebut, misi yang pertama merupakan misi utama atau prioritas dalam periode kepemimpinan 2008 – 2013. Adapun ke enam misi pembangunan daerah Kabupaten Murung Raya Periode Tahun 2008 - 2013, sebagai berikut :

1. Membebaskan masyarakat dari kemiskinan, kebodohan, keterisolasian (3K).
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik.
3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat menuju Murung Raya Sehat (maju dan unggul).
4. Menegakkan supremasi hukum.
5. Memantapkan kehidupan sosial budaya (toleransi kultural, kerukunan antar umat beragama, suku, ras maupun golongan).
6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup

Misi Pembangunan Kabupaten Murung Raya adalah sebagai berikut :

1. Mempercepat kemerdekaan rakyat dari keterisolasian;
2. Mempercepat kemerdekaan rakyat dari kemiskinan;
3. Mempercepat kemerdekaan rakyat dari kebodohan;
4. Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, serta pemberantasan korupsi;
5. Memantapkan toleransi kultural, kerukunan antar umat beragama, suku, ras maupun golongan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Mempercepat pengembangan wilayah melalui pemberdayaan ekonomi lokal dan peningkatan investasi daerah dengan memperhatikan keserasian tata ruang dan kelestarian lingkungan hidup;
7. Meningkatkan kepedulian sosial, kesadaran hukum masyarakat dan mengembangkan kehidupan politik yang demokratis.



B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam Undang—Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa yang dimaksud dengan strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sedangkan yang dimaksud dengan program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Kemudian yang dimaksud dengan kebijakan adalah arah / tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.

Dalam RPJMD Kabupaten Murung Raya periode tahun 2008 – 2013, ada enam misi pembangunan daerah yang harus dituntaskan dengan strategi pembangunan daerah yang akan ditetapkan. Ke enam misi pembangunan daerah tersebut yaitu :

- (1) Membebaskan masyarakat dari kemiskinan, kebodohan, keterisolasian (3K).
- (2) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik.
- (3) Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat menuju Indonesia Sehat (maju dan unggul).
- (4) Menegakkan supremasi hukum.
- (5) Memantapkan kehidupan sosial budaya (toleransi kultural, kerukunan antar umat beragama, suku, ras maupun golongan).
- (6) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup

1. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Semua strategi yang dikemukakan berikut ini merupakan hasil analisis korelasi lingkungan internal dan eksternal (Analisis SWOT) pada masing-masing misi.

2. Membebaskan Masyarakat dari Kemiskinan, Kebodohan, Keterisolasian (3K).

3. Strategi dan Arah Kebijakan Membebaskan Masyarakat dari Kemiskinan

Membebaskan masyarakat dari kemiskinan adalah merupakan salah satu prioritas pembangunan (3K) dalam periode perencanaan tahun 2008 – 2013 di Kabupaten Murung Raya. Strategi yang dilakukan yaitu dengan menggerakkan fungsi ekonomi daerah dengan arah kebijakan masing-masing bidang sebagai berikut :

3.1 Arah Kebijakan Bidang Perhubungan

- Peningkatan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan darat, sungai, dan udara
- Peningkatan rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ
- Peningkatan pelayanan angkutan darat, sungai dan udara
- Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan
- Peningkatan pengendalian dan pengamanan lalu lintas darat, sungai dan udara
- Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor, kapal motor, dan pesawat udara.

3.2 Arah Kebijakan Bidang Tenaga Kerja

- Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja
- Peningkatan kesempatan kerja
- Optimalisasi perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan

3.3 Arah Kebijakan Bidang Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi

- Terwujudnya peningkatan kualitas iklim usaha kecil menengah yang konduktif
- Terwujudnya peningkatan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah
- Terwujudnya peningkatan kualitas sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah
- Terwujudnya peningkatan kualitas kelembagaan koperasi

3.4 Arah Kebijakan Bidang Penanaman Modal

- Peningkatan promosi dan kerjasama investasi
- Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi
- Optimalisasi penyediaan sarana dan prasarana penunjang investasi daerah

3.5 Arah Kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan
- Pengembangan lembaga ekonomi perdesaan
- Peningkatan partisipasi dalam membangun desa
- Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
- Peningkatan peran perempuan di perdesaan



3.6 Arah Kebijakan Bidang Pertanian, Peternakan, dan Perikanan

- Peningkatan kesejahteraan petani
- Peningkatan ketahanan pangan
- Peningkatan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
- Peningkatan upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
- Peningkatan produksi hasil peternakan
- Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
- Peningkatan penerapan teknologi peternakan
- Pengembangan budidaya perikanan
- Pengembangan sistem penyuluhan perikanan
- Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
- Pengembangan kawasan budidaya air tawar

3.7 Arah Kebijakan Bidang Kehutanan dan Perkebunan

- Peningkatan pemanfaatan potensi sumber daya hutan
- Peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan
- Peningkatan pembangunan kawasan hutan industri
- Peningkatan pembinaan dan penertiban industri hasil hutan
- Optimalisasi perencanaan dan pengembangan hutan
- Peningkatan pemanfaatan potensi perkebunan
- Peningkatan dan rehabilitasi perkebunan rakyat
- Peningkatan pembangunan kawasan perkebunan
- Peningkatan pembinaan perkebunan rakyat
- Peningkatan penyuluh perkebunan

3.8 Arah Kebijakan Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral

- Peningkatan pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan
- Peningkatan pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan
- Peningkatan pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan

3.9 Arah Kebijakan Bidang Perindustrian

- Peningkatan kapasitas iptek sistem produksi
- Peningkatan pembangunan industri kecil dan menengah
- Peningkatan kemampuan teknologi industri
- Optimalisasi penataan struktur industri
- Peningkatan pembangunan sentra-sentra industri potensial

3.10 Arah Kebijakan Bidang Perdagangan

- Peningkatan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
- Peningkatan kerjasama perdagangan internasional
- Peningkatan ekspor non migas
- Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
- Peningkatan pembinaan pedagang kaki lima dan asongan
- Pengurangan hambatan perdagangan

4. Strategi dan Arah Kebijakan Membebaskan Masyarakat dari Kebodohan

Membebaskan masyarakat dari kebodohan adalah merupakan salah satu prioritas pembangunan (3K) dalam periode perencanaan tahun 2008 – 2013 di Kabupaten Murung Raya. Strategi yang dilakukan yaitu dengan menggerakkan fungsi pendidikan dengan arah kebijakan :

4.1 Arah Kebijakan Bidang Pendidikan

- Peningkatan pembangunan pendidikan anak usia dini
- Peningkatan pembangunan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun
- Peningkatan pembangunan pendidikan menengah
- Peningkatan pembangunan pendidikan non formal
- Peningkatan pembangunan pendidikan luar biasa
- Peningkatan pembangunan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan
- Peningkatan budaya baca dan pembinaan perpustakaan
- Peningkatan kualitas manajemen pelayanan pendidikan

4.2 Arah Kebijakan Bidang Pemuda dan Olah Raga

- Peningkatan keserasian kebijakan pengembangan pemuda
- Peningkatan peran serta kepemudaan
- Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
- Peningkatan upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba
- Peningkatan kualitas manajemen olah raga
- Optimalisasi pembinaan dan pemasyarakatan olah raga
- Peningkatan sarana dan prasarana olah raga

5. Strategi dan Arah Kebijakan Membebaskan Masyarakat dari Keterisolasian

Membebaskan masyarakat dari keterisolasian adalah merupakan salah satu prioritas pembangunan (3K) dalam periode perencanaan tahun 2008 – 2013 di Kabupaten Murung Raya. Strategi yang dilakukan yaitu dengan menggerakkan fungsi perumahan dan fasilitas umum dengan arah kebijakan masing-masing bidang sebagai berikut :

5.1 Arah Kebijakan Bidang Pekerjaan Umum

- Peningkatan pembangunan jalan dan jembatan
- Peningkatan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
- Peningkatan pembangunan turap/talud/bronjong
- Peningkatan rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
- Peningkatan rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong
- Peningkatan inspeksi kondisi jalan dan jembatan
- Peningkatan persiapan tanggap darurat jalan dan jembatan
- Peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
- Peningkatan pembangunan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
- Peningkatan persediaan dan pengelolaan air baku
- Peningkatan pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya
- Peningkatan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
- Peningkatan sumberdaya untuk pengendalian banjir
- Mengembangkan wilayah strategis dan cepat tumbuh
- Peningkatan pembangunan infrastruktur perdesaan

5.2 Arah Kebijakan Bidang Perumahan

- Pengembangan perumahan di perdesaan
- Peningkatan kualitas lingkungan sehat perumahan
- Peningkatan pemberdayaan komunitas perumahan
- Peningkatan perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial
- Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
- Peningkatan kualitas pengelolaan areal pemakaman

6. Strategi dan Arah Kebijakan Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

Meningkatkan kualitas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik adalah merupakan tekad untuk mensukseskan keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan (3K) dalam periode perencanaan tahun 2008 – 2013 di Kabupaten Murung Raya. Strategi yang dilakukan yaitu dengan menggerakkan fungsi pelayanan umum dengan arah kebijakan masing-masing bidang sebagai berikut :

6.1. Arah Kebijakan Bidang Perencanaan Pembangunan

- Menyediakan data/informasi pembangunan daerah
- Peningkatan kerjasama pembangunan
- Optimalisasi perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
- Optimalisasi perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar
- Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
- Optimalisasi perencanaan pembangunan daerah
- Optimalisasi perencanaan pembangunan ekonomi
- Optimalisasi perencanaan sosial dan budaya
- Optimalisasi perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
- Optimalisasi perencanaan pembangunan daerah rawan bencana

6.2. Arah Kebijakan Bidang Pemerintahan Umum

- Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
- Peningkatan pelayanan kepala daerah/wakil kepala daerah
- Peningkatan manajemen pengelolaan keuangan daerah

- Optimalisasi pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa
- Peningkatan pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
- Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparaturngawasan
- Menata dan menyempurnakan system dan prosedur pengawasan
- Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
- Peningkatan kualitas penanganan pengaduan masyarakat
- Peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah
- Optimalisasi penataan peraturan perundang-undangan
- Optimalisasi penatalaksanaan daerah otonomi baru

6.3. Arah Kebijakan Bidang Kepegawaian

- Peningkatan pendidikan kedinasan
- Peningkatan kapasitas sumber daya aparaturng
- Peningkatan pembinaan dan pengembangan aparaturng

6.4. Arah Kebijakan Bidang Kearsipan

- Peningkatan kualitas sistem administrasi kearsipan
- Peningkatan upaya penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
- Peningkatan pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan
- Peningkatan kualitas pelayanan informasi

6.5. Arah Kebijakan Bidang Statistik

- Data / informasi / statistik daerah untuk kepentingan perencanaan baik pemerintah maupun swasta masih kurang.

6.6. Arah Kebijakan Bidang Komunikasi Dan Informasi

- Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa
- Optimalisasi penelitian bidang informasi dan komunikasi
- Peningkatan kualitas sdm bidang komunikasi dan informasi
- Peningkatan kerjasama informasi dengan mas media

6.7. Arah Kebijakan Bidang Umum (Setda)

- Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
- Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Peningkatan disiplin aparatur
- Fasilitasi pindah/purna tugas pns
- Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

7. Strategi dan Arah Kebijakan Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat

Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat adalah merupakan tekad untuk mensukseskan keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan (3K) dalam periode perencanaan tahun 2008 – 2013 di Kabupaten Murung Raya. Strategi yang dilakukan yaitu dengan menggerakkan fungsi kesehatan dengan arah kebijakan masing-masing bidang sebagai berikut :

Arah Kebijakan Bidang Kesehatan

- Peningkatan distribusi obat dan perbekalan kesehatan
- Peningkatan upaya kesehatan masyarakat
- Peningkatan pengawasan obat dan makanan
- Pengembangan obat asli indonesia
- Peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
- Memperbaiki gizi masyarakat
- Peningkatan kualitas lingkungan sehat
- Mencegah dan menanggulangi penyakit menular
- Menetapkan standarisasi pelayanan kesehatan
- Peningkatan pelayanan kesehatan penduduk miskin
- Peningkatan dan memperbaiki sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya
- Peningkatan dan memperbaiki sarana dan prasarana rumah sakit umum daerah Puruk Cahu
- Menjalin kemitraan dan peningkatan pelayanan kesehatan
- Peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
- Peningkatan pelayanan kesehatan lansia

- Peningkatan pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan
- Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

Arah Kebijakan Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

- Peningkatan hasil pembangunan keluarga berencana
- Peningkatan kesehatan reproduksi remaja
- Peningkatan pelayanan kontrasepsi
- Peningkatan pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri
- Peningkatan promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan dimasyarakat
- Peningkatan pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR
- Peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS
- Peningkatan pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak
- Peningkatan tenaga pendamping kelompok bina keluarga
- Peningkatan pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU

8. Strategi dan Arah Kebijakan Menegakkan Supremasi Hukum

Menegakkan Supremasi Hukum adalah merupakan tekad untuk mensukseskan keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan (3K) dalam periode perencanaan tahun 2008 – 2013 di Kabupaten Murung Raya. Strategi yang dilakukan yaitu dengan menggerakkan fungsi ketertiban dan ketentraman dengan arah kebijakan masing-masing bidang sebagai berikut :

8.1 Arah Kebijakan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

- Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
- Peningkatan kantrantibnas dan pencegahan tindak kriminal
- Peningkatan wawasan kebangsaan
- Peningkatan kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
- Optimalisasi pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
- Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
- Peningkatan pendidikan politik masyarakat
- Peningkatan upaya pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana

8.2 Meningkatkan Partisipasi Menanggulangi Isu Nasional

- Menurunkan angka pelanggaran kegiatan illegal logging
- Menurunkan angka pelanggaran kegiatan illegal mining
- Menurunkan angka pelanggaran kegiatan yang menimbulkan inefisiensi pengelolaan keuangan daerah
- Menurunkan angka pelanggaran bahaya narkoba
- Menurunkan angka pelanggaran kegiatan yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi (pungutan liar)
- Menurunkan angka pelanggaran pelanggaran korupsi

9. Strategi dan Arah Kebijakan Memantapkan Kehidupan Sosial Budaya

Memantapkan Kehidupan Sosial Budaya adalah merupakan tekad untuk mensukseskan keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan (3K) dalam periode perencanaan tahun 2008 – 2013 di Kabupaten Murung Raya. Strategi yang dilakukan yaitu dengan menggerakkan fungsi perlindungan sosial, fungsi pariwisata dan budaya dengan arah kebijakan masing-masing bidang sebagai berikut :

9.1 Arah Kebijakan Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil

- Peningkatan Kualitas Administrasi Kependudukan
- Peningkatan Ketersediaan Data Kependudukan
- Peningkatan Pembangunan Sistem Informasi Kependudukan

9.2 Arah Kebijakan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- Peningkatan kualitas anak dan perempuan
- Memperkuat kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
- Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan
- Peningkatan peran serta dan kesehatan jender dalam pembangunan
- Memperkuat kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

9.3 Arah Kebijakan Bidang Sosial

- Optimalisasi Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya



- Peningkatan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
- Peningkatan pembinaan anak terlantar
- Peningkatan pembinaan para penyandang cacat dan trauma
- Peningkatan pembinaan panti asuhan/panti jompo
- Peningkatan Bimbingan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba, dan Penyakit Sosial lainnya)
- Optimalisasi pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial

9.4 Arah Kebijakan Bidang Pariwisata

- Pengembangan pemasaran pariwisata
- Pengembangan destinasi pariwisata
- Pengembangan kemitraan

9.5 Arah Kebijakan Bidang Budaya

- Pengembangan Nilai Budaya Daerah
- Optimalisasi Pengelolaan Kekayaan Budaya
- Optimalisasi Pengelolaan Keragaman Budaya
- Peningkatan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya

10. Strategi dan Arah Kebijakan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

Meningkatkan kualitas lingkungan hidup adalah merupakan tekad untuk mensukseskan keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan (3K) dalam periode perencanaan tahun 2008 – 2013 di Kabupaten Murung Raya. Strategi yang dilakukan yaitu dengan menggerakkan fungsi lingkungan hidup dengan arah kebijakan masing-masing bidang sebagai berikut :

10.1 Arah Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah dan Penataan Ruang

- Mewujudkan pembangunan wilayah yang merata, sinkron dan konsisten dengan Rencana Tata Ruang.
- Meningkatkan dan memperluas pembangunan infrastruktur perdesaan.
- Meningkatkan dan memantapkan pengembangan kawasan cepat tumbuh dan strategis dengan pendekatan pembangunan kawasan terpadu dan pendekatan kluster kewilayahan.

- Mewujudkan pembangunan Kota Murung Raya yang serasi, seimbang dan proporsional yang dapat mendorong percepatan perkembangan kota kecamatan dan perdesaan dengan meningkatkan fungsi kota.
- Meningkatkan kualitas pelayanan jasa / barang, dan penataan fungsi Kota Muara Teweh sebagai kota transit bagi beberapa kabupaten lainnya.
- Meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum melalui tertib administrasi dan pelayanan pertanahan.

10.2 Arah Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup

- Peningkatan kinerja pengelolaan persampahan
- Peningkatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
- Peningkatan perlindungan dan konservasi sumber daya alam
- Peningkatan rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam
- Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup
- Peningkatan pengendalian polusi
- Peningkatan pembangunan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan-kawasan konvensional hutan
- Peningkatan pengendalian kebakaran hutan
- Peningkatan rehabilitasi ekosistem pedalaman
- Peningkatan Kualitas Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

10.3 Arah Kebijakan Bidang Pertanahan

- Peningkatan pembangunan sistem pendaftaran tanah
- Mengoptimalkan penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
- Mengoptimalkan penyelesaian konflik-konflik pertanahan
- Pengembangan sistem informasi pertanahan

C. PRIORITAS DAERAH

Berdasarkan pada kondisi, permasalahan dan potensi Kabupaten Murung Raya, serta memperhatikan prioritas pembangunan nasional dan Propinsi Kalimantan Tengah, termasuk *common goals*-nya, maka pembangunan Kabupaten Murung Raya tahun 2009 diorientasikan pada 5 (lima) prioritas, yaitu :

1. Infrastruktur

Pembangunan pada bidang ini adalah pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan antara kecamatan, kelurahan dan desa untuk membuka keterisolasian daerah dan membuka akses perekonomian dan kesehatan serta pendidikan sampai ke daerah-daerah pedalaman.

2. Pendidikan

Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dengan di tunjang oleh tenaga guru yang baik di daerah

3. Kesehatan

Peningkatan kemampuan pelayanan kesehatan yang akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

4. Pengembangan Ekonomi Lokal

- Peningkatan produktivitas subsektor pertanian, perikanan dan peternakan
- Pengembangan kawasan perkebunan dan rehabilitasi hutan
- Pemanfaatan sda secara optimal dengan tetap memperhatikan harmonisasi lingkungan dan kelestarian sda
- Pengembangan daya saing industri dan perdagangan
- Penguatan koperasi dan kelembagaan ekonomi lokal
- Pengembangan kawasan transmigrasi

5. Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pembangunan di kabupaten Murung Raya sangat strategis harus berwawasan lingkungan mewujudkan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, social budaya masyarakat secara berkesinambungan serta mengoptimalkan produktivitas pemanfaatan dan pengendalian tata ruang sesuai peraturan perundang-undangan.

6. Penguatan Kelembagaan Otonomi Daerah

Sementara ini pembangunan Kabupaten Murung Raya tahun 2009 difokuskan pada upaya, pembangunan infrastuktur, pendidikan, kesehatan dan pengurangan angka kemiskinan dan serta pelestarian lingkungan hidup. Upaya pengurangan kemiskinan memiliki dimensi yang luas dan kompleks, yaitu menyangkut aspek

sosial, budaya, fisik, ekonomi, dan bahkan politik. Karena itu, penyelesaiannya harus secara menyeluruh (holistik) dan ditujukan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat agar dapat menolong dirinya sendiri. Pembangunan prasarana dan sarana dasar dimaksudkan untuk menstimulasi pertumbuhan perekonomian daerah maupun dalam upaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Mengingat keterbatasan sumber daya yang tersedia, maka pembangunan diprioritaskan kepada kegiatan yang memiliki daya dongrak besar terhadap upaya pengurangan kemiskinan, pembangunan jalan dan jembatan, perluasan lapangan kerja dan serta pertumbuhan ekonomi. Agar pembangunan dapat berlangsung secara berkelanjutan, maka pemeliharaan dan pemulihan daya dukung lingkungan harus menjadi bagian dari pembangunan itu sendiri.

Perincian dari masing-masing fokus di antaranya sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana (khususnya prasarana dan sarana dasar), dengan sasaran :
 - Peningkatan pembangunan jalan desa dan jembatan.
 - Peningkatan infrastruktur jalan kabupaten dan jembatan sangrahan.
 - Peningkatan prasarana penyedia air baku.
 - Pembangunan jalan Saripoi – Stadion dan penyiapan lahan bandara baru.
2. Sasaran Kebijakan Bidang Pendidikan
 - Peningkatan pembangunan pendidikan anak usia dini
 - Peningkatan pembangunan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun
 - Peningkatan pembangunan pendidikan menengah
 - Peningkatan pembangunan pendidikan non formal
 - Peningkatan pembangunan pendidikan luar biasa
 - Peningkatan pembangunan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan
 - Peningkatan budaya baca dan pembinaan perpustakaan
 - Peningkatan kualitas manajemen pelayanan pendidikan
3. Sasaran Kebijakan Bidang Kesehatan
 - Peningkatan distribusi obat dan perbekalan kesehatan
 - Peningkatan upaya kesehatan masyarakat
 - Peningkatan pengawasan obat dan makanan
 - Peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat



- Peningkatan kualitas lingkungan sehat
- Menetapkan standarisasi pelayanan kesehatan
- Peningkatan pelayanan kesehatan penduduk miskin
- Peningkatan dan memperbaiki sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya
- Peningkatan dan memperbaiki sarana dan prasarana rumah sakit umum daerah Puruk Cahu
- Menjalinkan kemitraan dan peningkatan pelayanan kesehatan
- Peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
- Peningkatan pelayanan kesehatan lansia

4. Pengurangan kemiskinan, dengan sasaran :

- Peningkatan pemberdayaan masyarakat.
- Menumbuhkan keswadayaan masyarakat.
- Pembuatan pilot proyek pengentasan kemiskinan di 4 desa program PM2L.
- Peningkatan ketrampilan ketenagakerjaan.
- Pemberian bantuan yang tepat sasaran.

5. Perbaikan kualitas lingkungan hidup, dengan sasaran :

- Rehabilitasi lahan kritis.
- pengolahan sampah terpadu.
- Peningkatan kesiapan dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana alam.

